

Representasi Calon Bupati Mandailing Natal Pada Pilkada 2024 Dalam Media Mandailing Online

Salwa Azhira*, Siti Kholifah
Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
*salwaazhira22@student.ub.ac.id

Abstract

This study analyzes Mandailing Online's representation strategy in reporting on two candidate pairs for Regent of Mandailing Natal in the 2024 regional elections, identifies the power relations and ideologies operating behind these discursive practices, and formulates their implications for the local democratic public sphere. The research employs Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) as a dialectical reasoning framework (2018, 2020), which systematically moves from describing discursive problems to explaining their social causes and advocating for structural change. The data corpus comprises 174 news articles published from September to November 2024, analyzed qualitatively. The findings reveal systematic discourse polarization: Candidate Pair 01 is consistently constructed through a social-organizational capital framework, while Candidate Pair 02 is represented through performative religiosity discourse. This polarization is structurally produced by media ownership networks that are relationally embedded in local political power, resulting in unequal access to public discourse and a narrowing of voters' capacity for independent political judgment. The study concludes that local media operates as an instrument for reproducing political dominance rather than functioning as an autonomous public sphere, making regulatory reform of media ownership and the strengthening of public critical literacy urgent priorities.

Keywords: *Critical Discourse Analysis; Media Representation; Discursive Hegemony; Local Elections; Unequal Access to Discourse*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi representasi Mandailing Online dalam memberitakan kedua pasangan calon Bupati Mandailing Natal pada Pilkada lokal 2024, mengidentifikasi relasi kuasa dan ideologi yang bekerja di balik praktik diskursif tersebut, serta merumuskan implikasinya bagi ruang publik demokratis lokal. Penelitian menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (CDA) Norman Fairclough sebagai *dialectical reasoning* (2018, 2020), yakni pendekatan yang bergerak secara sistematis dari pendeskripsian masalah diskursif menuju penjelasan akar sosialnya dan rekomendasi perubahan struktural. Korpus data berupa 174 berita periode September-November 2024 dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan polarisasi wacana yang sistematis: Paslon 01 dikonstruksikan melalui kerangka modal sosial-organisasional, sementara Paslon 02 direpresentasikan melalui wacana religiusitas performatif. Polarisasi ini diproduksi oleh struktur kepemilikan media yang terhubung dengan jaringan kekuasaan politik lokal, sehingga menciptakan ketimpangan akses terhadap ruang wacana publik dan mempersempit kemampuan pemilih dalam membentuk penilaian politik secara mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media lokal beroperasi sebagai instrumen reproduksi dominasi politik, bukan ruang publik yang otonom, sehingga reformasi regulasi kepemilikan media dan penguatan literasi kritis masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kata Kunci: *Analisis Wacana Kritis; Representasi Media; Hegemoni Diskursif; Pilkada Local; Unequal Access to Discourse*

Pendahuluan

Demokrasi elektoral bertumpu pada asumsi bahwa kompetisi politik yang bebas dan adil mampu menghasilkan representasi rakyat yang substantif. Namun dalam praktiknya, arena elektoral di Indonesia kerap menunjukkan paradoks, prosedur demokrasi berjalan formal, sementara pengaruh antaraktor tetap timpang akibat penetrasi oligarki politik (Aspinall & Berenschot, 2019). Partisipasi yang tinggi tidak serta-merta menjamin kualitas demokrasi apabila dibarengi dengan kooptasi institusi dan manipulasi wacana publik.

Dalam perspektif sosiologis, kontestasi elektoral bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin, melainkan peristiwa sosial yang mereproduksi stratifikasi, relasi kuasa, dan kesadaran kolektif di dalam komunitas (Durkheim, 1938). Salah satu dimensi yang paling determinan dalam reproduksi wacana politik elektoral adalah peran media. Merujuk pada Tapsell (2017) media bukan ruang netral melainkan arena di mana narasi kekuasaan dibentuk, diperkuat, dan didistribusikan. Di tingkat lokal, media bahkan cenderung lebih menentukan dibanding media nasional, karena ia menjadi satu-satunya ruang diskursif yang secara intensif membingkai kandidat, memberi makna pada kontestasi, dan mengarahkan persepsi pemilih.

Artinya, siapa yang menguasai produksi wacana di media lokal, pada level tertentu turut menentukan arah demokrasi itu sendiri. Pilkada Kabupaten Mandailing Natal (Madina) 2024 menjadi kasus yang relevan dan kaya secara sosiologis untuk mengkaji fenomena ini. Madina adalah kabupaten hasil pemekaran dari Tapanuli Selatan pada 1998 yang memiliki struktur sosial-budaya khas, yakni sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yang mengatur relasi antara *mora* (pemberi wanita), *kahanggi* (kerabat semarga), dan *anak boru* (penerima wanita) sebagai landasan harmoni sosial.

Identitas masyarakatnya juga sangat dipengaruhi oleh religiusitas Islam yang kuat, tercermin dalam semboyan resmi daerah "Negeri Beradat Taat Beribadah." Dua lapisan identitas ini, adat dan agama, menjadi sumber daya simbolik yang potensial untuk dipolitisasi dalam kampanye elektoral. Kontestasi Pilkada 2024 mempertemukan dua pasangan calon: Harun Mustafa Nasution-M. Ichwan Hussein Nasution yang diusung koalisi Gerindra, Golkar, dan PAN, serta Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi (SAHATA) yang diusung koalisi Demokrat, PKS, PKB, NasDem, PPI, dan P3. Kedua kandidat utama berasal dari rumpun marga yang sama, yaitu Nasution, sehingga kontestasi ini membelah ikatan kekerabatan yang dalam sistem *Dalihan Na Tolu* semestinya menjadi perekat solidaritas.

Hasil rekapitulasi KPU pada 3 Desember 2024 mencatat kemenangan tipis SAHATA dengan 98.429 suara (50,24%) atas rivalnya yang meraih 97.488 suara (49,76%), dengan selisih hanya 941 suara atau 0,48%. Pasca-Pilkada, konflik berlanjut ke ranah hukum melalui gugatan persyaratan LHKPN di Mahkamah Konstitusi, sekaligus memperlihatkan betapa dalamnya luka sosial yang ditinggalkan oleh kontestasi tersebut. Di tengah minimnya liputan media nasional terhadap dinamika Pilkada Madina, Mandailing Online tampil sebagai aktor diskursif yang dominan.

Media ini bukan sekadar kanal informasi, melainkan panggung utama tempat identitas, citra, dan narasi kedua kandidat direpresentasikan dan dipertarungkan secara simbolik. Pilihan Mandailing Online sebagai objek kajian didasarkan pada argumen bahwa media lokal justru lebih determinan dalam membingkai realitas elektoral di daerah dibandingkan media arus utama nasional (Tapsell, 2017). Meneliti Mandailing Online berarti membuka jendela untuk melihat bagaimana demokrasi lokal tidak sekadar dikonsumsi, tetapi dikonstruksi dan dinegosiasikan oleh medium yang lahir dari lokalitas masyarakatnya sendiri. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi representasi Mandailing Online dalam memberitakan kedua

pasangan calon, mengidentifikasi relasi kuasa dan ideologi yang bekerja di balik praktik diskursif tersebut, serta merumuskan implikasinya bagi kualitas ruang publik demokratis lokal. Penelitian ini menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (CDA) Norman Fairclough sebagai *dialectical reasoning* (2018, 2020) dengan korpus data sebanyak 174 berita yang dipublikasikan sepanjang September hingga November 2024.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka *Critical Discourse Analysis* (CDA) yang dioperasionalkan melalui empat tahapan *dialectical reasoning* Norman Fairclough (2018, 2020), yakni *normative critique*, *explanation*, *explanatory critique*, dan *advocating action*, yang bekerja secara sirkuler dan integratif dari tataran teks menuju tataran struktur sosial. Sumber data utama berupa 174 artikel berita daring dari portal Mandailing Online yang dipublikasikan selama periode kampanye Pilkada Mandailing Natal, September hingga November 2024, terdiri atas 83 artikel tentang Pasangan Calon (Paslon) 01 dan 91 artikel tentang Paslon 02, yang ditentukan secara purposif berdasarkan kriteria relevansi topik terhadap pemberitaan kedua kandidat bupati. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dengan mengarsipkan teks berita beserta metadata publikasinya, sementara instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang didukung panduan analisis tekstual berisi indikator linguistik seperti pilihan diksi, modalitas, struktur kalimat, representasi aktor, metafora, dan nominalisasi. Proses analisis dimulai dari tahap *normative critique*, di mana peneliti memetakan fitur-fitur linguistik dalam setiap artikel untuk mengidentifikasi bagaimana Mandailing Online mengonstruksi representasi yang berbeda antara kedua paslon. Temuan tekstual tersebut kemudian dijelaskan secara kausal pada tahap *explanation* dengan menelusuri konteks kelembagaan portal, mencakup struktur kepemilikan media, afiliasi editorial, dan posisinya dalam ekosistem media lokal Mandailing Natal. Pada tahap *explanatory critique*, analisis diperluas ke arah kondisi sosial-struktural yang lebih luas, termasuk jaringan elite politik lokal, relasi antara pemilik modal dan kandidat, serta dinamika sosial-budaya seperti politisasi sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* dalam proses kampanye, guna menjelaskan bahwa ketimpangan representasi bukan bersifat insidental melainkan mencerminkan relasi kuasa yang sistemik. Seluruh temuan analisis tersebut kemudian diintegrasikan pada tahap *advocating action* untuk merumuskan rekomendasi transformatif yang berkaitan dengan reformasi regulasi kepemilikan media lokal dan penguatan literasi kritis masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya ruang publik demokratis yang lebih berimbang.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum mengurai temuan analisis, perlu ditegaskan satu proposisi kritis sebagai landasan pembahasan ini. Pola pemberitaan Mandailing Online selama Pilkada Madina 2024 mengandung ketimpangan representasi yang bersifat sistematis, bukan sekadar produk perbedaan intensitas kampanye antar kandidat. Dari 174 berita yang dianalisis (83 tentang Paslon 01 dan 91 tentang Paslon 02), ditemukan bahwa pemberitaan Paslon 01 terkonsentrasi pada domain politik-struktural, sementara pemberitaan Paslon 02 hampir sepenuhnya berada pada domain religius-moral.

Yang tidak kalah signifikan adalah ketiadaan konten tertentu secara menyeluruh, tidak ada analisis komparatif rekam jejak kandidat, tidak ada eksplorasi program konkret yang terukur, dan tidak ada ruang bagi perspektif kritis. Ketiadaan ini sendiri merupakan bentuk *social wrong* karena pemilih dikonstruksikan bukan sebagai warga yang berhak atas informasi komprehensif, melainkan sebagai audiens pasif yang menerima narasi yang telah dipikirkan.

1. Polarisasi Wacana: Modal Sosial Versus Religiusitas Performatif

Narasi paling dominan yang dibangun untuk Paslon 01 adalah wacana perubahan. Jargon "ONMA" menjadi penanda simbolik dari semangat anti-status quo, yang diperkuat oleh keluhan warga yang dimediasi media, petani terdampak banjir, guru madrasah yang kehilangan insentif, hingga pedagang pasar yang merasa terabaikan. Melalui pola ini, Harun-Ichwan diposisikan sebagai "harapan baru" bagi kelompok-kelompok marjinal, dengan anti-status quo sebagai wacana pemersatu berbagai elemen pendukung. Strategi linguistik yang digunakan berfokus pada representasi aktor kolektif sebagai sumber legitimasi. Judul-judul seperti "IKM Dukung Paslon Harun-Ichwan" (29 September 2024) dan "FKDT Madina Datangi Paslon Harun-Ichwan" (30 September 2024) menempatkan organisasi sebagai subjek aktif yang memberi dukungan, menciptakan kesan momentum politik yang terorganisir dan mendorong efek bandwagon. Dukungan struktural dari mesin partai juga dikonstruksikan secara intensif, seperti dalam judul "Aswin Parinduri: Paslon Harun-Ichwan Punya Interpensi Politik Dalam Membangun Madina Lewat Pemerintah Pusat" (9 Oktober 2024).

Frasa "interpensi politik lewat pemerintah pusat" ini perlu dicermati secara kritis. Frasa tersebut bekerja sebagai ideologi yang dinaturalisasi, yakni sebuah asumsi yang disajikan seolah fakta tak terbantahkan bahwa pembangunan daerah hanya mungkin melalui koneksi vertikal ke Jakarta, bukan melalui kapasitas lokal yang otonom. Dalam kerangka Fairclough, inilah yang disebut *naturalization of ideology*, di mana relasi kekuasaan yang asimetris antara pusat dan daerah dikemas sebagai keunggulan pragmatis kandidat, alih-alih dibaca sebagai ketergantungan struktural yang justru perlu dikritisi.

Paslon 01 juga menggunakan bahasa teknokratis secara konsisten ("visi dan misi terukur", "3 proyek strategis lewat Komisi V DPR-RI") yang mengadopsi register manajemen pembangunan modern. Bahasa ini secara tidak langsung mengeksklusi pemilih yang tidak familiar dengan terminologi tersebut, sehingga partisipasi demokratis tereduksi menjadi penonton atas pertunjukan kompetensi elite. Konstruksi wacana Paslon 02 bergerak ke arah yang berlawanan secara fundamental. Media meliput secara intensif momen-momen keagamaan Saipullah, menjadi imam salat Jumat dan Subuh, memimpin doa tahlilan, ceramah di majelis taklim, hingga menangis saat mendoakan rakyat Palestina. Kata kerja "imam", "penceramah", dan "pimpin doa" memiliki konotasi sakral yang menempatkan kandidat sebagai perantara antara jamaah dan Tuhan.

Pengulangan tema ini membuat identitas Saipullah sebagai pemimpin religius tampak natural dan melekat, sebuah efek yang dalam perspektif CDA merupakan hasil konstruksi diskursif yang deliberat, bukan cerminan dari realitas kampanye yang netral. Narasi filantropi memperkuat konstruksi ini. Judul-judul seperti "Saipullah Santuni 249 Anak Yatim di Panyabungan" (7 Oktober 2024) dan "Saipullah Santuni 127 Yatim di 6 Desa" (12 Oktober 2024) tidak sekadar mendokumentasikan kegiatan amal, tetapi membangun pola tindakan yang berulang dan mengaktifkan skema ekonomi moral di mana pemimpin yang sah adalah yang mendistribusikan kekayaan untuk rakyat. Legitimasi dikonstruksikan bukan melalui klaim kandidat sendiri, melainkan melalui suara komunitas, warga biasa, keluarga, dan ulama, yang secara bersama-sama menciptakan kesan bahwa kesalehan Saipullah diakui lintas lapisan sosial.

Tabel 1. Beberapa Judul Pemberitaan Mandailing Online Pada September-Oktober 2024

Harun Mustafa Nasution - M. Ichwan Hussein Nasution (Paslon 1)	Saipullah Nasution - Atika Azmi Utammi (Paslon 2)
IKM (Ikatan Keluarga Minang) Dukung Paslon Harun-Ichwan di Pilkada Madina.	Saipullah Imam Salat Jum'at di Gunung Baringin.
FKDT Madina Datangi Paslon Harun-Ichwan Keluhkan Nasib Guru MDTA.	Calbup Saipullah Jadi Imam dan Penceramah Kultum Subuh di Gunungtua.

Kamus dan IKBBG se Jabotabeg Dukung Paslon Harun-Ichwan.	Pimpin Doa untuk Rakyat Palestina, Saipullah Menangis.
Partai Gerindra Madina Nilai Hadirnya Paslon Harun-Ichwan Bawa Perubahan Terbaik Bagi Kemajuan Madina ke Depan.	Usai Imam Salat Jumat, Saipullah Marlopo dengan Warga.
Aswin Parinduri: Paslon Harun-Ichwan Punya Interpensi Politik Dalam Membangun Madina Lewat Pemerintah Pusat.	Saipullah Hadiri Pengajian Akbar di Siabu.
Tiga Kecamatan di Madina Nyatakan Dukungan ke Harun-Ichwan.	Warga Sebut Saipullah Sosok Religius Berjiwa Sosial Tinggi.
Warga Desa Pagur Dukung dan Siap Menangkan Pasangan Harun-Ichwan.	Umak-umak Bilang Saipullah Itu Pria yang Soleh dan Ramah.
Sihepeng Raya Sepakat Menangkan Paslon 1.	Ustadz Hendri: Saipullah Istiqomah Jalankan Tugas.

Sumber: Diolah oleh penulis dari *MandailingOnline.com*, 2024

Tabel di atas memperlihatkan kontras yang tajam, di mana pemberitaan Paslon 01 didominasi oleh aktor kolektif (organisasi, partai, kecamatan) sebagai subjek yang memberi legitimasi, sementara pemberitaan Paslon 02 menempatkan kandidat sebagai subjek dari praktik keagamaan. Dua paradigma kepemimpinan yang berbeda ini dikonstruksikan secara diskursif melalui seleksi editorial yang konsisten dan berulang, bukan muncul secara organik dari aktivitas kampanye. Sintesis dari kedua pola ini menunjukkan bahwa media tidak sekadar meliput kontestasi, melainkan aktif mendefinisikan medan persaingan itu sendiri.

Paslon 01 dikonstruksikan dalam logika modernitas-birokratis yang mengutamakan jaringan dan kapabilitas manajerial, sementara Paslon 02 dikonstruksikan dalam logika moral-spiritual yang mengutamakan kesalehan dan kedekatan emosional dengan komunitas. Keduanya adalah *order of discourse* yang bersaing, yakni dua sistem pengetahuan tentang kepemimpinan yang masing-masing menawarkan kriteria berbeda untuk menilai kelayakan seorang pemimpin. Persoalan demokratis yang muncul adalah bahwa medan ini tidak setara, satu kandidat mendapat *privilege* untuk dikonstruksikan secara lebih *favorable* melalui kontrol atas produksi makna, sementara informasi yang berpotensi mendekonstruksi narasi tersebut secara konsisten absen dari pemberitaan.

2. Ekonomi Politik Media dan Relasi Kuasa

Polarisasi wacana yang ditemukan tidak dapat dipahami secara terpisah dari struktur kepemilikan Mandailing Online. Data kepemilikan media menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas portal ini merangkap jabatan sebagai pejabat publik petahana di Kabupaten Mandailing Natal. Dualitas peran ini menciptakan apa yang oleh Fairclough disebut sebagai *order of discourse* yang tercemar kepentingan, di mana batas antara fungsi jurnalistik dan fungsi reproduksi kekuasaan menjadi kabur secara struktural (Fairclough, 2018). Pernyataan pemilik dalam artikel Mandailing Online (25 Mei 2025) yang menyebutkan bahwa media didirikan untuk membuka "media ekonomi" mengindikasikan bahwa fungsi jurnalistik telah tersubordinasi pada logika instrumental, di mana media beroperasi sebagai alat akumulasi kapital politik, bukan sebagai ruang publik yang otonom.

Jaringan redaksional memperkuat kondisi ini. Pemimpin Umum portal tercatat memiliki keanggotaan dalam grup dukungan digital untuk Paslon 02, sementara unsur manajemen lain memiliki keterlibatan dalam birokrasi daerah yang dikuasai petahana.

Afiliasi-afiliasi ini bukan sekadar preferensi personal, melainkan disposisi yang secara struktural membentuk praktik redaksional. Dalam terminologi CDA, kondisi ini disebut sebagai *discursive colonization*, di mana kepentingan politik eksternal merembes ke dalam ruang produksi berita yang semestinya otonom, sehingga bias bukan merupakan penyimpangan individual melainkan produk dari tatanan institusional itu sendiri.

Mekanisme *gatekeeping* yang dipengaruhi struktur kepemilikan ini tampak pada dimensi *what to cover*. Latar belakang Saipullah sebagai pejabat senior Kementerian Keuangan, pengalamannya sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai, dan catatan pencalonannya sebagai Caleg DPR RI 2024 hampir tidak muncul dalam pemberitaan. Sebaliknya, aspek religiusitas dan filantropi dikonstruksikan secara masif dan berulang. Seleksi semacam ini menghasilkan *unequal access to discourse*, yakni ketimpangan dalam kemampuan kandidat untuk mendefinisikan dirinya sendiri di hadapan publik pemilih. Di sisi lain, Paslon 01 sesekali menghadapi framing yang berpotensi melemahkan persepsi basis dukungannya, seperti judul "Paslon Harun-Ichwan Seolah Hanya Diperjuangkan Partai Gerindra" (15 November 2024) yang mengkonstruksikan narasi kelemahan meski secara faktual Paslon 01 didukung koalisi tiga partai besar. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa Mandailing Online tidak beroperasi sebagai ruang publik yang demokratis, melainkan sebagai aparatus reproduksi dominasi politik, yakni media yang menggunakan logika berita untuk melegitimasi satu paradigma kepemimpinan sekaligus menekan kemungkinan evaluasi kritis dari publik pemilih.

3. Dominasi Wacana di Media Massa Tidak Menjamin Kemenangan

Pilkada Madina 2024 menghadirkan paradoks yang secara analitis penting, meskipun pemberitaan Mandailing Online lebih *favorable* terhadap Paslon 02 dalam konstruksi religiusitas dan filantropi, kemenangan Paslon 02 dengan selisih tipis 941 suara (50,24% berbanding 49,76%) tidak dapat serta-merta dikaitkan sebagai bukti efektivitas dominasi wacana media tersebut. Dalam kerangka Fairclough (2018) dominasi dalam *order of discourse* tidak otomatis menghasilkan dominasi dalam arena sosial lain, karena agen sosial tetap memiliki kapasitas untuk menegosiasikan, menolak, atau mengalihkan makna yang diproduksi institusi.

Faktor yang secara signifikan bekerja di luar kendali media massa adalah dinamika media sosial. Akun *Instagram* Atika Azmi Utammi (Paslon 02) memiliki 23.500 pengikut dibanding akun Harun Mustafa Nasution (Paslon 01) dengan 9.770 pengikut, dengan *engagement rate* yang lebih tinggi meski jumlah unggahan lebih sedikit (626 dibanding 1.347). Temuan ini mengonfirmasi tesis *attention economy* bahwa yang menentukan bukan kuantitas paparan, melainkan kualitas koneksi emosional (Goldhaber, 1997). Media sosial dalam konteks Pilkada Madina berperan sebagai *counter-order*, ruang yang mendemokratisasi produksi wacana politik dan memberi panggung bagi narasi religius serta akar rumput yang tidak bergantung pada mediasi media massa konvensional.

Temuan ini memiliki implikasi konseptual yang penting bagi studi media politik lokal di Indonesia. Pertama, dominasi wacana dalam satu platform media tidak secara linier menentukan hasil elektoral, karena ekosistem informasi yang berlapis menghasilkan negosiasi makna yang kompleks di tingkat pemilih. Kedua, media lokal yang terikat oleh kepentingan pemilik modal cenderung memproduksi wacana yang mencerminkan relasi kuasa yang ada, bukan merepresentasikan keragaman aspirasi publik.

Ketiga, dalam masyarakat seperti Madina yang memiliki struktur nilai religius dan kekerabatan yang kuat, kapital simbolik kesalehan dapat bekerja sebagai sumber legitimasi yang melampaui modal politik formal. Secara keseluruhan, penelitian ini

menegaskan bahwa media lokal di Indonesia perlu dibaca tidak hanya sebagai kanal informasi, tetapi sebagai arena pertarungan wacana yang struktur kepemilikannya menentukan batas-batas dari apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan dalam ruang publik elektoral.

Kesimpulan

Mandailing Online memproduksi polarisasi representasi yang sistematis dan deliberat, di mana Paslon 01 dikonstruksikan melalui kerangka modal sosial-organisasional dan logika modernitas birokratis, sementara Paslon 02 direpresentasikan hampir eksklusif melalui wacana religiusitas performatif dan filantropi, sebuah pola yang bukan cerminan perbedaan aktivitas kampanye yang organik melainkan hasil seleksi editorial yang konsisten dan terstruktur. Pola ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan diproduksi oleh struktur kepemilikan media yang terhubung secara relasional dengan jaringan kekuasaan politik lokal, sehingga fungsi jurnalistik ter subordinasi pada logika reproduksi dominasi politik. Meski demikian, dominasi wacana dalam media massa tidak secara linier menentukan hasil elektoral, karena ekosistem informasi yang berlapis termasuk media sosial menghasilkan negosiasi makna yang lebih kompleks di tingkat pemilih. Secara teoritis, temuan ini menegaskan relevansi kerangka *Critical Discourse Analysis* Fairclough dalam konteks media lokal Indonesia sekaligus memperluasnya, dengan menunjukkan bahwa *unequal access to discourse* tidak semata terjadi di level nasional, tetapi bekerja secara lebih tersembunyi di level daerah, di mana konsentrasi kepemilikan media dan kekuasaan politik cenderung berada dalam satu simpul yang sama dan sulit dideteksi publik. Kontribusi ini relevan bagi perdebatan tentang kualitas demokrasi elektoral lokal di Indonesia, yakni bahwa ketimpangan representasi media merupakan masalah struktural yang tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan profesionalisme jurnalistik semata. Secara praktis, penelitian ini mendorong tiga agenda mendesak, yaitu reformasi regulasi kepemilikan media lokal dengan pembatasan rangkap peran antara pemilik media dan pejabat publik aktif, penguatan literasi kritis pemilih yang diintegrasikan ke dalam program pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan KPU dan Bawaslu di daerah, serta penguatan independensi pers daerah melalui transparansi kepemilikan, penegakan kode etik redaksional, dan pengembangan jurnalisme berbasis komunitas sebagai alternatif terhadap media yang terikat kepentingan modal. Penelitian ini mengakui batasannya pada satu portal media dalam satu periode kampanye, sehingga penelitian lanjutan yang membandingkan beberapa media lokal lintas daerah atau menganalisis dinamika wacana media sosial melalui pendekatan *digital discourse analysis* akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana demokrasi lokal dikonstruksikan dan dinegosiasikan di ruang informasi yang semakin terfragmentasi.

Daftar Pustaka

- Andrian, A., & Wardani, S. B. E. (2021). Peran Modal Politik Dan Modal Sosial Pencalonan Suryana Dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 28-45.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale: Elections, Clientelism, And The State In Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Badara, A., & Jamiludin, J. (2020). Representation Of Indonesian Women Workers: A Critical Discourse Analysis On The Newspapers Of Nationalist-Secular And Islamic Ideological Perspectives. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 79-101.

- Bourdieu, P. (1991). *Language And Symbolic Power*. Cambridge: Harvard University Press.
- Durmaž, Z., & Yoğun, M. S. (2022). A Critical Discourse Analysis Of A Visual Image In Norman Fairclough's CDA Model. *International Journal of Scholars in Education*, 5(1), 25-33.
- Durkheim, E. (1938). *The Rules Of Sociological Method*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fairclough, I., & Fairclough, N. (2012). *Political Discourse Analysis: A Method For Advanced Students*. London: Routledge.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse And Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study Of Language*. London: Routledge.
- Fairclough, N. (2015). *Language And Power*. London: Routledge.
- Fairclough, N. (2018). *CDA As Dialectical Reasoning. The Routledge Handbook Of Critical Discourse Studies*. London: Routledge.
- Fairclough, N., & Fairclough, I. (2018). A Procedural Approach To Ethical Critique In CDA. *Critical Discourse Studies*, 15(2), 169-185.
- Freedman, D. (2014). Media Policy Silences: The Hidden Face Of Communications Governance. *International Journal of Press/Politics*, 19(2), 153-169.
- Goldhaber, M. H. (1997). The Attention Economy And The Net. *First Monday*, 2(4).
- Haerunisa, N., & Sobari, T. (2023). Discourse Issues Three Periods Of Jokowi's Leadership: Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis In Kompas.Com News Text. *JLER (Journal of Language Education Research)*, 6(2), 127-138.
- Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi Sosial: Mobilisasi Jaringan Kekuasaan Dan Keagamaan Kyai Dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat. *Sosial Budaya*, 16(1), 9-22.
- Hasibuan, F. A., Achiriah, A., & Sumanti, S. T. (2023). The History Of The Development Of Islam by Malim Salawet in Mandailing Natal in 1810-1870 A.D. *Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora*, 8(1), 172-177.
- Mahpudin, M. (2020). Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan Dalam Kontestasi Elektoral Di Kabupaten Lebak. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 98-117.
- Martalia, M., Ashadi, A., & Susilawati, S. (2024). Wacana Moderasi Beragama Kementerian Agama: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5(1), 88-106.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian Innovations In Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics And Executive Illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021-1036.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining The 2016 Islamist Mobilisation In Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups And The Politics Of Accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479-497.
- Nurdin, C. R., Widaningsih, T., & Budianto, H. (2023). Media Discourse Of Indonesian Presidential Debates Between Joko Widodo and Prabowo Subianto in 2019 Election (Analysis Study Of Norman Fairclough's Critical Discourse In Republika). *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 4(2), 582-592.
- Riordan, K. (2019). Ownership, Control And Credibility In News Media. *Journalism Practice*, 13(10), 1228-1245.
- Sawri, S. (2020). Friksi Politik-Agama Dalam Kontestasi Elektoral Pilkada DKI Jakarta 2017-2022: Studi Atas Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 14-27.

- Schudson, M. (2002). The News Media As Political Institutions. *Annual Review of Political Science*, 5(1), 249-269.
- Surahmat, S., Wijana, I. D. P., & Sulistyowati, S. (2024). Marginalization Of Minority Ethnicities In Ethnic Humor Discourse In Indonesia: A Critical Discourse Analysis. *Jurnal Arbitrer*, 11(3), 384-398.
- Tapsell, R. (2015). Platform Convergence In Indonesia: Challenges And Opportunities For Media Freedom. *Convergence: The International Journal of Research Into New Media Technologies*, 21(2), 182-197.
- Tapsell, R. (2017). *Media Power In Indonesia: Oligarchs, Citizens And The Digital Revolution*. London: Bloomsbury Publishing PLC.
- Van Dijk, T. A. (1993). Principles Of Critical Discourse Analysis. *Discourse & Society*, 4(2), 249-283.
- Walker, R. F. (2022). Correcting 'A Notional' Confusion For Critical Discourse Analysis. *Journal of Critical Realism*, 21(5), 509-528.
- Witianti, S., Paskarina, C., & Solihah, R. (2025). Youth Mobilization In The 2019 Election Campaign In West Java, Indonesia (Study Of The Gerindra Party, the Indonesia Democratic Party of Struggle, and the Prosperous Justice Party). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(1), 13-23.
- Yuliani, Y. (2022). Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing Natal Tentang Filosofi Negeri Beradat Taat Beribadah Dan Relevansinya Terhadap Masyarakat Mandailing Natal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 1-12.
- Zainuri, A. (2021). Doktrin Kultural Politik NU. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 18(2), 176-190